

SKRIPSI

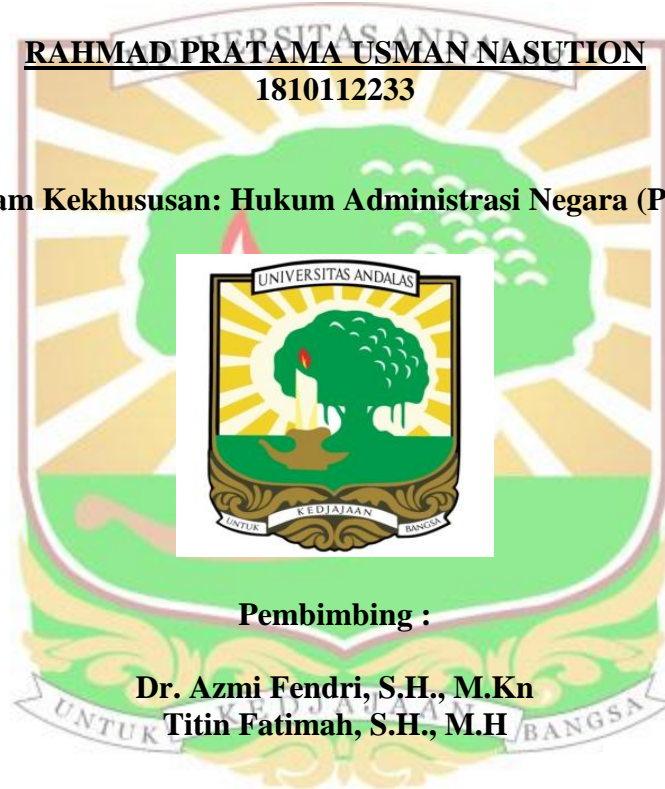
**PEMULIHAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI BATANG BUNGO OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RAHMAD PRATAMA USMAN NASUTION
1810112233

Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 04/PK-VII/I/2024

PEMULIHAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI BATANG BUNGO

OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 155 PP No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai Pemulihan Mutu Air dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah apabila tidak diketahui sumber, dan pelaku pencemarannya. Sejalan dengan PP tersebut Perbup Bungo Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. Bupati membentuk dan menugaskan bidang seksi pemulihan guna membantu Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan usaha-usaha pemulihan kualitas lingkungan serta penyebarluasan informasi dan teknologi lingkungan. Pada Penelitian ini Penulis ingin mengetahui peran pemerintah dalam pemulihan pencemaran sungai Batang Bungo. Pencemaran ini telah terjadi dan tidak terlihatnya perkembangan kualitas air sungai baik itu dari pemulihan dan penghentian sumber pencemaran. Artinya sudah terlalu lama pencemaran ini tidak mendapatkan perhatian dan penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan aliran sungai Batang Bungo di Tanjung Gedang terkhusus peran dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo. yaitu: 1.) Bagaimana implementasi pemulihan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo terkait pencemaran air sungai di sungai Batang Bungo?. 2.) Apa saja hambatan yang menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Bungo dalam proses pemulihan pencemaran aliran sungai Batang Bungo?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dimana penulis mengkaitkan pelaksanaan yang dilakukan dengan peraturan yang berlaku. Ketidak maksimalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan pemulihan pencemaran air sungai Batang Bungo salah satunya diakibatkan oleh sarana untuk penetapan kelas air yang tidak mendukung. Hingga mengakibatkan kegiatan pemulihan pencemaran air sungai tidak dapat di laksanakan akibat dari perencanaan yang tidak disusun. Ditambah lagi dengan belum tercapainya dampak kinerja sesuai yang dikehendaki, baik dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat terkait menjaga dan melestarikan sungai Batang Bungo yang mengakibatkan tidak berhentinya sumber pencemaran. Sesuai dengan Pasal 476 ayat (2) pendanaan pemulihan sungai ini harus di ajukan terlebih dahulu dalam bentuk rancangan anggaran yang nantinya akan diajukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo kepada bupati. faktor hambatan terkait keterbatasan anggaran terutama dalam upaya penindakan pencemaran, kegiatan sosialisasi, dan kesadaran serta sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas pencemaran air sungai Batang Bungo.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pemulihan, Pelaksanaan, Sungai, Pencemaran, DLH